



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN  
DASAR MASA PANDEMI COVID-19  
(STUDI KASUS DI SDN 008 RUMBIO KECAMATAN KAMPAR  
KABUPATEN KAMPAR)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**OLEH**

**GILANG RYAN PRATAMA**  
**NIM. 11770513343**

**PROGRAM S1  
ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1442 H / 2021**



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : GILANG RYAN PRATAMA  
 NIM : 11770513343  
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN  
 PENDIDIKAN DASAR MASA PANDEMI COVID-19  
 (STUDI KASUS DI SDN 008 RUMBIO KECAMATAN  
 KAMPAR KABUPATEN KAMPAR)

DISETUJUI OLEH  
 DOSEN PEMBIMBING

Rusdi, S. Sos., MA  
 NIP. 19720906 200710 1 002

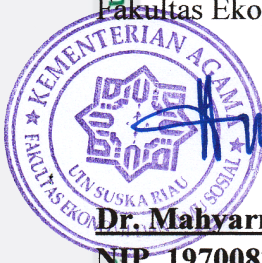
MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA JURUSAN

Administrasi Negara



Dr. Mahyarni, SE., MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Kamaruddin, S. Sos., M. Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : GILANG RYAN PRATAMA  
 NIM : 11770513343  
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN  
 PENDIDIKAN DASAR MASA PANDEMI COVID-19  
 (STUDI KASUS DI SDN 008 RUMBIO KECAMATAN  
 KAMPAR KABUPATEN KAMPAR)

TANGGAL UJIAN : SELASA, 06 JULI 2021

**PANITIA PENGUJI  
KETUA**

**Fakhurrozi, SE., MM**  
**NIP. 19670725 200003 1 002**

**PENGUJI I**

**Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 130 712 075**

**PENGUJI II**

**Abdiana Ilosa, S.Ap., MA**  
**NIP. 19870716 201503 2 003**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN  
DASAR MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI SDN 008  
RUMBIO KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR)**

**Oleh:**

**GILANG RYAN PRATAMA**

**NIM. 11770513343**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SDN 008 Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar). Dan untuk mengetahui kendala dalam Mengimplementasi Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SDN 008 Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).). Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan oleh George Edward III. Adapun metode analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan analisis Deskriptif. Adapun hasil yang dapat penulis sampaikan Dalam penelitian Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SDN 008 Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar). dapat dinyatakan bahwa Implementasi kebijakan yang dilkakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sudah terlaksana, namun ada faktor-faktor eksternal terikat yang menyebabkan kebijakan ini kurang berjalan baik.*

**Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Pembelajaran Pendidikan, Pemerintah Daerah**

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat selesai dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Baginda Muhammad SAW.

Penulis skripsi dengan judul “**Implementasi Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SDN 008 Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).**” ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, baik berupa dukungan materil, jasa terutama do'a. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sedikit banyaknya yang telah berpengaruh terhadap skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor UIN Suska Riau.
- Ibuk Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau.
- Bapak Dr. H. Mas,ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau.
- Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan izin dan waktu untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibuk Hj. Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Ibuk Dr. Juliana, SE., M.Si. selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A, selaku Penasehat Akademik. Bapak Rusdi, S. Sos., MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak/ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah berjasa memberikan ilmu kepada Penulis selama menempuh studi di Institusi ini.
6. Bapak/ibu tenaga kependidikan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas penunjang aktivitas perkuliahan.
7. Untuk keluargaku, yaitu Ayahanda Ridarwin (Almarhum) dan Ibunda Hj. Rosneli, S.Ag serta ayahanda H. Yusdawar, S.Pd, adikku Latifah Auni Rosada, kakak sepupuku Vivi Virgianti, S.Pd, dr. Ayu Pestari, dr. Rista Ayu Ilahi, adik sepupuku Ristalia Ayu dan seluruh anggota keluarga yang selalu





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan dukungan materil serta semangat dan cinta hingga penulis terpacu untuk merampungkan penulisan skripsi ini.

8. Untuk Ninda Junita Sari, S.Pd yang telah memberikan waktu, kritik, saran, motivasi dan sangat membantu agar tetap terus semangat dan tidak mengeluh selama proses mengerjakan skripsi sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Sahabat penulis, Muhammad Esa Fairuz, Danil Robi Nanda, Muhammad Filza, Mhd Rizky Aprio yang senantiasa memberikan support-nya selama penyusunan skripsi.

10. Keluarga besar mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau angkatan 2017, terutama mahasiswa lokal A yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan kebersamaannya baik dalam suka maupun duka.

11. Tidak terlepas kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pekanbaru, 1 Juli 2021  
Penulis

**Gilang Ryan Pratama**  
**NIM. 11770513343**

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABLE .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	16
1.3 Tujuan Penelitian .....	16
1.4 Manfaat Penelitian .....	16
1.5 Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
2.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	19
2.1.1. Tahap-tahap Kebijakan Publik .....	22
2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik .....	23
2.2 Pendidikan Dasar .....	25
2.3 Pengelolaan Pembelajaran Daring .....	26
2.4 Peraturan Peraturan Kebijakan Daring .....	29
2.4.1. Panduan Pembelajaran Tatap Muka Pada Zona Hijau .....	30
2.5 Pengelolaan Pembelajaran Tatap Muka Masa Pandemi Covid-19 .....	31
2.5.1. Satuan Pendidikan .....	32
2.5.2. Warga Satuan Pendidikan.....	32
2.5.3. Selama Berada di Lingkungan Satuan Pendidikan.....	35
2.6 Pandangan Islam Terhadap Kebijakan Publik .....	37
2.7 Penelitian Terdahulu .....	39
2.8 Konsep Operasional .....	40



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

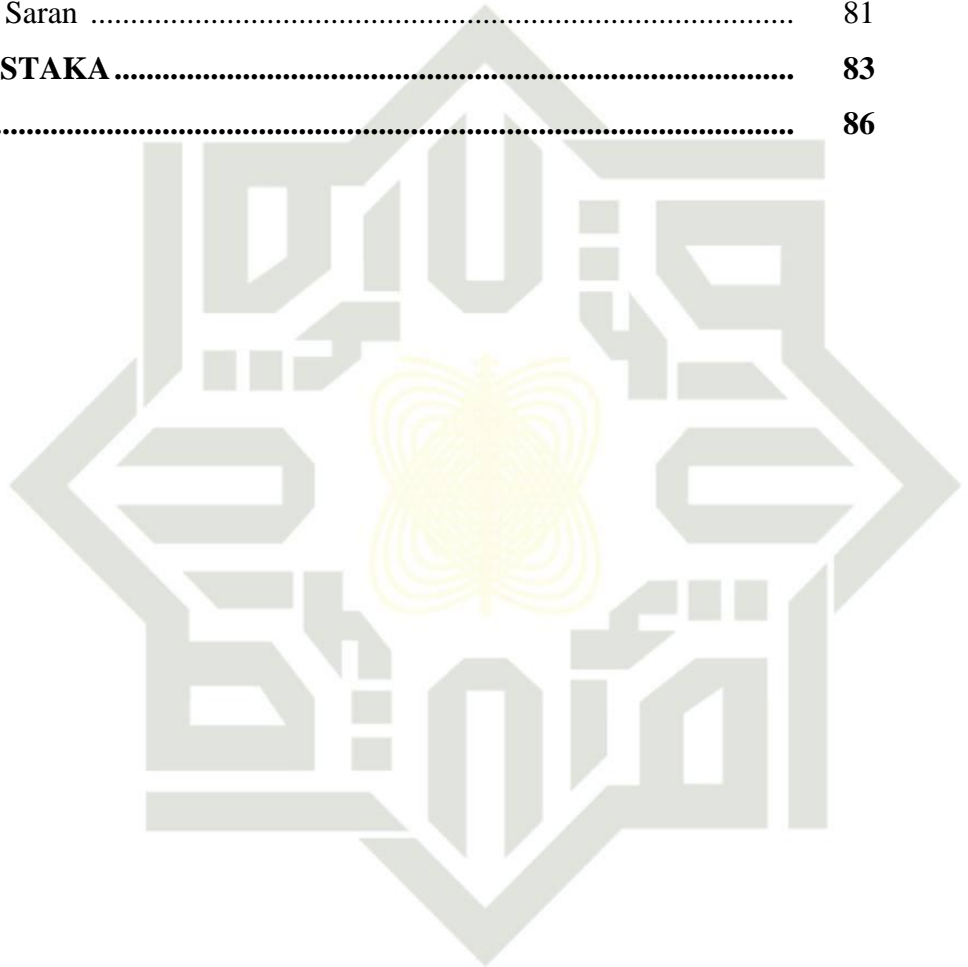
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	43
3.2 Jenis Penelitian .....	43
3.3 Sumber Data .....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.5 Informan Penelitian .....	45
3.6 Metode Analisa Data .....	46
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Gambaran singkat Kabupaten Kampar .....	48
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar .....	48
4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Kampar .....	49
4.2 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar .....	50
4.3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar .....	60
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
5.1 Analisis Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di SDN 008 Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).....	61
5.1.1 Komunikasi .....	62
5.1.2 Sumberdaya .....	67
5.1.3 Disposisi .....	72
5.1.4 Struktur Birokrasi .....	75
5.2 Faktor-faktor Penghambat Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa Pandemi Covid-19	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Studi Kasus di Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kampar) .....	78
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
6.1 Kesimpulan .....	80
6.2 Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>



UIN SUSKA RIAU

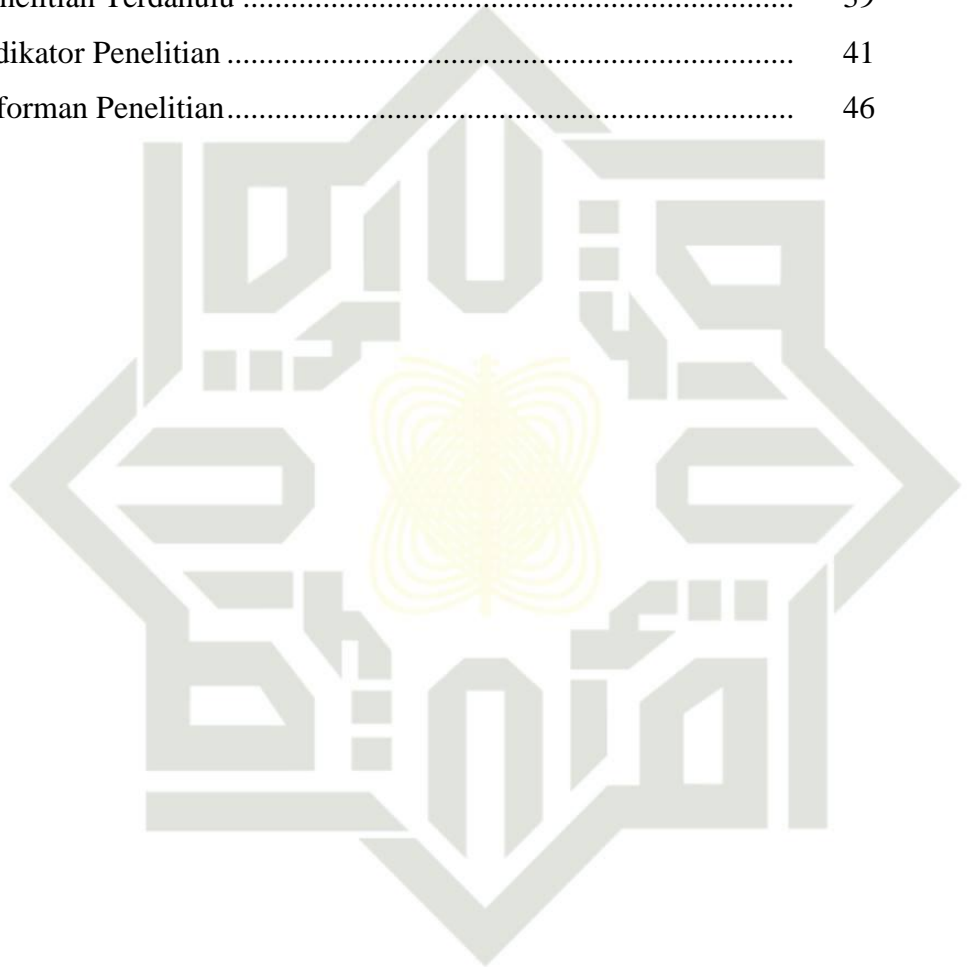


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Satuan Pendidikan .....	32
Tabel 2.2	Warga Satuan Pendidikan .....	22
Tabel 2.3	Selama Berada di Lingkungan Satuan Pendidikan .....	35
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel 2.5	Indikator Penelitian .....	41
Tabel. 3.1	Informan Penelitian .....	46



UIN SUSKA RIAU



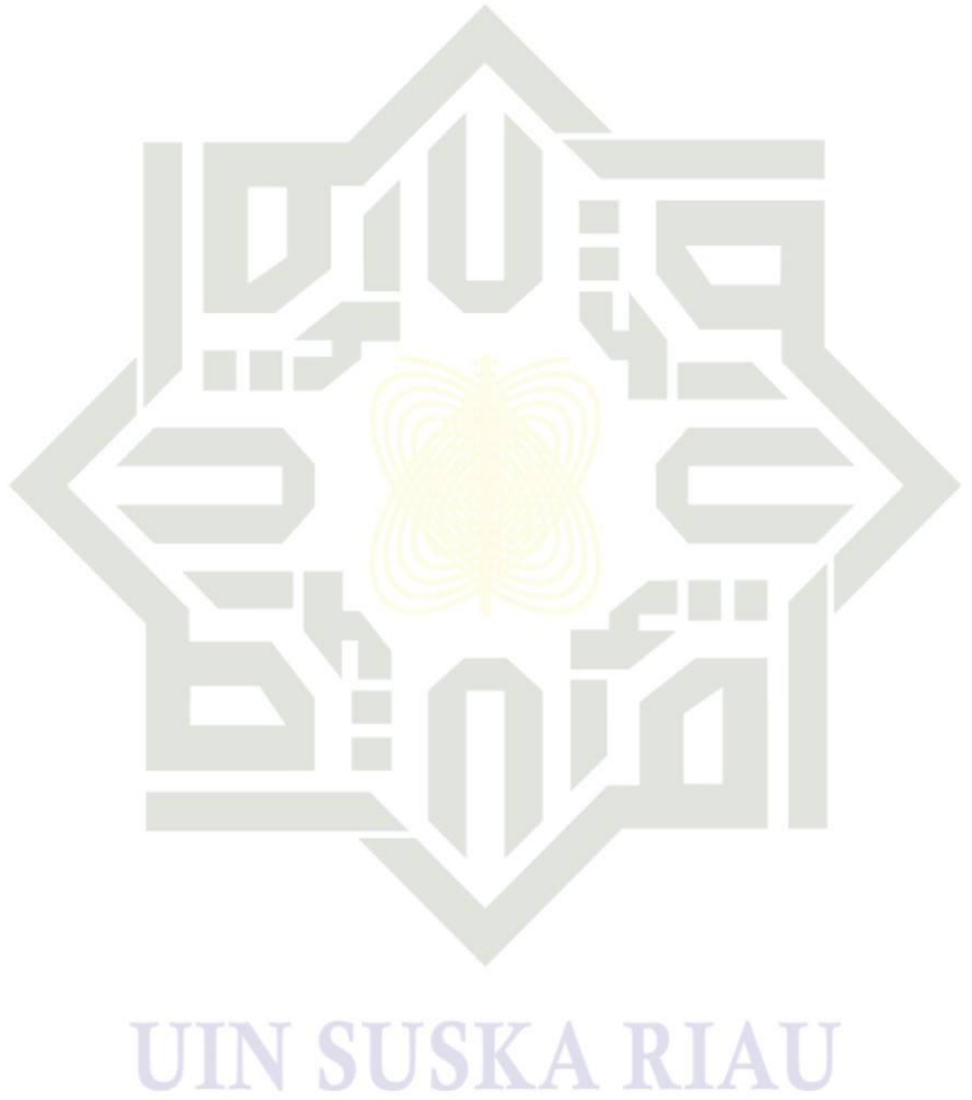


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar .....	60
--	----





## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan keterampilan serta membentuk kepribadian bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk menumbuhkan kembangkan potensi-potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang bertaqwa, memiliki akhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, inovatif, mandiri, agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Pendidikan adalah proses yang sangat berperan dalam upaya membangun bangsa ini. Pendidikan dalam hal ini merupakan tanggung jawab negara dalam mencetak dan membentuk generasi-generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia.

Dengan adanya pendidikan diharapkan mampu merubah kepribadian bangsa ini serta agar mampu membentuk peserta didik memiliki kemampuan serta keahlian untuk menuju kehidupan yang lebih maju nantinya.

Adapun bentuk upaya yang dilakukan negara yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan dibidang pendidikan. Kebijakan ini nantinya akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini harus mengacu atau mempedomani beberapa standar pendidikan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya standar pendidikan ini nantinya akan menentukan berhasil atau tidaknya pengelolaan pendidikan baik, apakah standar pendidikan sudah diterapkan atau di implementasi dengan baik di sekolah-sekolah atau tidak.

Pengimplementasian standar pendidikan juga akan menentukan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Standar pendidikan di Indonesia dibentuk oleh badan standar yang merujuk pada 8 standar pendidikan yaitu standar (kelulusan, isi, proses, pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, evaluasi, pembiayaan, sarana dan prasarana). Semua standar tersebut diharapkan dapat dicapai oleh sekolah demi meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijaksanaan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan-pembuatan keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program dan pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di atas sudah dijelaskan secara detail tentang definisi kebijakan. Dan adapun konsep kebijakan pendidikan yang bisa dipahami dalam dua makna yaitu kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, dan educational policy merupakan Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan. Dengan demikian kebijakan-kebijakan yang diambil berkenaan dengan dunia pendidikan juga menjadi bagian dari produk kebijakan publik (Sigit Purnomo, 2010). Pertimbangan lainnya kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik, bisa dicermati dari 1) kebijakan pendidikan memiliki dampak terhadap masyarakat secara luas, 2) mengimplementasikan kebijakan pendidikan diperlukan dana publik yang sangat besar, bahkan alokasi dana dari APBN untuk pendidikan merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan sektor publik lainnya (Sigit Purnomo, 2010).

Perspektif teoretis, kajian kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kajian kebijakan publik dibidang pendidikan mengatur regulasi yang berkaitan penyerapan anggaran, alokasi sumber daya, distribusi sumber, dan tata tertib perilaku pendidik. (Arif Rohman, 2009;107). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan pada tingkatan makro menjadi aplikasi ilmu pendidikan sekaligus bagian dari applied sciences bidang pendidikan di sekolah dan luar sekolah. Prinsip yang dimiliki ilmu pendidikan tidak berbeda dengan prinsip dan konsep kebijakan publik pada umumnya. Fungsi pendidikan menjadi rangkaian dari rumusan kebijakan publik. Termasuk penerapan administrasi pendidikan dan 12 Analisis Kebijakan Pendidikan menunjang pencapaian tujuan pendidikan, begitu juga untuk fungsi serta strategi lainnya dari konsep manajerial

prinsipnya sama dengan apa yang di implementasikan dalam lingkup manajemen dikaji dalam kebijakan publik. (Sutapa, 2005).

Analisis kebijakan pendidikan penting dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, guna membantu menentukan pilihan tepat atas suatu tindakan yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat itu sendiri, khususnya dalam aspek pendidikan. *Policy analysis is the use of reason and evidence to make the best policy choice*, artinya dalam melakukan analisis kebijakan seorang analis perlu berhati-hati dalam mengamati situasi masalah yang akan dijadikan objek kebijakan agar terhindar dari kesalahan pemilihan alternatif kebijakan yang keliru (Duncan MacRae, 1985). Disamping itu, ada beberapa argumentasi lainnya yang menjelaskan urgensi analisis kebijakan pendidikan, antara lain; 1) menjadi pertimbangan yang ilmiah, rasional dan objektif bagi semua pembuatan kebijakan, 2) memungkinkan kebijakan didesain lebih sempurna guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yakni mencerdaskan manusia Indonesia, 3) karena persoalannya bersifat multi dimensional, saling terkait (interdependent) dan terintegrasi satu dengan lainnya, 4) memungkinkan tersedia pedoman (panduan) yang komprehensif dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan. Hal ini disebabkan analisis kebijakan pendidikan mencakup dua hal yaitu bersifat substansial saat ini dan strategis yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang, 5) memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi orang tua siswa dan masyarakat. (Badjuri dan Yuwono, 2002).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedudukan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai kewenangan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diantara lembaga atau instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung adalah diantaranya Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olaharga Kabupaten Kampar. Adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olaharga Kabupaten Kampar adalah pokok melaksanakan sebahagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai kewenangan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (UPTD) Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar bernama Kandep Dikbud yang digabungkan dengan Dinas Pendidikan. Setelah Terjadi Otonomi Daerah. Di UPTD Pendidikan dan Kebudayaan di pimpin oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) Kecamatan Kampar dan pada Tahun 2004 berubah menjadi UPTD Pendidikan Kecamatan Kampar dan pada tahun 2012 berubah lagi menjadi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kampar. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Bangkinang untuk melaksanakan segala urusan administrasi guru dan pegawai tenaga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kependidikan yang ada di Kecamatan Kampar. Tujuan dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kampar adalah untuk mewujudkan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kampar unggul dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan menuju masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, berwawasan dan memiliki daya saing.

Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kampar mempunyai tugas dan fungsi untuk menyiapkan bahan Pelaksanaan pengendalian urusan 3 Kepegawaian, Keuangan, Kesiswaan, Ketenagaan pada Sekolah Dasar dan SMP di wilayah Pelayanannya.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan pemerintahan daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/SMP. Sedangkan Pemerintahan Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Sementara pendidikan tinggi menjadi ranah dan tanggung jawab pemerintah pusat. Berdasarkan undang-undang tersebut diatas maka pemerintah Kabupaten Kampar hanya mengurus urusan pendidikan dasar, mulai dari PAUD sampai SMP, dengan kewenangan yang telah dibatasi tersebut membuat pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar lebih fokus untuk meningkatkan mutu pendidikan

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar dalam peningkatan mutu dan kualitas disetiap jenjang pendidikan merupakan sebuah tantangan yang luar biasa, karena hari ini masalah pendidikan merupakan sebuah hal yang dianggap sangat penting dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cial ditengah-tengah masyarakat, ini dibuktikan dengan berkurangnya angka putus sekolah khususnya diwilayah kabupaten. Kamar dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya kelembaga pendidikan, tidak hanya pendidikan umum, tetapi juga pendidikan agama.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kamar telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkat mutu dan kualitas pendidikan. Ini bisa dilihat dari peringkat yang diraih Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kamar yang selalu naik dari tahun ketahun dan juga banyaknya siswa kabupaten Kamar yang menjadi perwakilan provinsi Riau menuju tingkat nasional dalam berbagai event

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan kepemudaan dan olahraga kabupaten Kamar mengalami kendala diddalam pelayanan pendidikan, tepanya pada proses pembelajaran, hal itu disebabkan oleh Pandemi Wabah Covid-19. Proses pembelajaran yang seharusnya di lakukan secara tatap muka tidak bisa dilaksanakan selama masa Pandemi Covid-19. Banyak kendala yang terjadi selama Wabah Covid-19 seperti, belajar dalam jaringan (daring) dan pembatasan tatap muka yang mengakibatkan tidak sepenuhnya proses pembelajaran tersebut berjalan sesuai dengan harapan kita semua.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kamar tetap berupaya bagaimana siswa bisa bersekolah dan mendapatkan pendidikan. Hal tersebut ditandai dengan adanya kebijakan-kebijakan strategis yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kamar.

Berdasarkan surat edaran Bupati Kampar Nomor : 360/Covid-19-Set/VI, tanggal 02 Juni 2020. Dengan maksud dan tujuan Permintaan Pelaksanaan Kegiatan selama masa Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar. Berikut ini disampaikan laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar selama masa PSBB:

1. Melaksanakan standar protokoler kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah seperti penggunaan masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak dalam berkomunikasi serta melakukan pengecekan suhu tubuh kepada semua pegawai dan siapapun yang berurusan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar selama masa pandemi Covid-19 dan terkhususnya selama masa PSBB.
2. Membatasi kontak fisik dengan sesama pegawai di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar, dengan semua kepala sekolah dan guru dan tenaga kependidikan lainnya yang akan berurusan ke kantor dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
3. Melakukan rapat-rapat kedinasan dengan kepala sekolah dan seluruh elemen pendidikan lainnya dengan menggunakan fasilitas teknologi Virtual/ Telekomfren, sehingga pengelolaan pendidikan dapat tetap berjalan dalam masa pandemi Covid-19 dan masa PSBB.
4. Memerintahkan kepada seluruh satuan pendidikan/sekolah tingkat SD dan SMP untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran antara pendidik dan peserta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didik secara daring/online (Work From Home/WFH) untuk menghindari perluasan penyebaran Covid-19.

Berdasarkan analisa penulis mengenai surat Bupati Kampar Nomor : 360/Covid-19-Set/VI, tanggal 02 Januari 2020 point nomor 4. Menurut penulis kebijakan Work From Home/WFH membuat guru dan peserta didik menjadi jenuh ketika belajar dirumah, Work From Home/WFH juga mengurangi interaksi antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Work From Home/WFH juga memungkinkan akan menurunkan kualitas proses belajar dan mengajar karena tidak adanya interaksi secara langsung selama proses belajar mengajar antara guru dan peserta didik.

Pelaksanaan mengenai surat Bupati Kampar Nomor : 360/Covid-19-Set/VI, tanggal 02 Januari 2020 belum berjalan dengan baik. Masih banyak kekurangan seperti tidak semua siswa sekolah dasar di kecamatan Kampar yang memiliki Smartphone atau Gadget yang membuat siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dari rumah atau daring. Masih banyak juga siswa sekolah dasar yang sulit mendapatkan jaringan. Dengan adanya metode pembelajaran dari rumah atau daring membuat orang tua harus senantiasa mengawasi anaknya dalam proses belajar.

Menindaklanjuti surat edaran menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19, surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13. A Tahun 2020 Tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat

Wabah virus corona di Indonesia, dan surat edaran Bupati Kampar nomor; 556/DPK-PP/2020/205 tentang kewaspadaan dan Pencegahan penulsaan Corona Virus Disease (Covid-19).

Adapun kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar menghadapi Corono Virus Disease (Covid-19) adalah sebagai berikut :

1. Proses Belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
  - b. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19.
  - c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah.
  - d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kualitatif.
2. Ujian sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;
- b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/ atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
- c. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
- d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi Sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Kelulusan Sekolah Dasar (SD) ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
  - 2) Untuk nilai rapor semester 12 (duabelas) jenjang SD dan 6 (enam) dapat dilakukan dalam penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.
  - 3) Tentang format nilai siswa kelas 6 akan diinfokan kemudian hari.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini.
  - b. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.
  - c. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

Dengan Mempedomani **Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor :**

**04/KB/2020, Nomor : 737 Tahun 2020, Nomor : HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor : 420-3987 Tahun 2020 tanggal 20 November 2020 tentang panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Diase (Covid-19), menindak lanjuti Surat Edara Menteri Dalam Negeri Nomor : 420/6546/SJ tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 di Daerah dan Surat Izin BUPATI KAMPAR Nomor: 005/SATGAS-SET/XII/074, tanggal : 30 Desember 2020, tentang: Izin Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap Tahun Pembelajaran 2020/2021,** maka Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar memberikan Izin Kepada Satuan Pendidikan atau Sekolah yang berada di Kabupaten Kampar untuk melakukan Pembelajaran Tatap



Muka (PTM) mulai semester dua (genap) tahun Pembelajaran 2020/2021 pada masa Pandemi Covid-19 di satuan pendidikan jenjang TK/PAUD/PNF, SD dan SMP.

Pemberian Izin Pembelajaran Tatap Muka bagi Satuan Pendidikan ini, Wajib memperhatikan/ mempedomani/ memenuhi dan memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kepala Sekolah Pendidikan/ Sekolah, Guru, Tenaga Pendidikan, Seluruh Warga Sekolah dan Peserta Didik
2. Kepala Sekolah satuan pendidikan wajib menyerahkan daftar checklist kesiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara manual kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
3. PTM di satuan pendidikan/sekolah dilaksanakan melalui dua fase transisi dan masa kebiasaan baru :
  - a. Masa Transisi : Berlangsung selama 2 (dua) bulan, sejak dimulainya PTM di satuan pendidikan ;
  - b. Masa Kebiasaan Baru: apabila pada masa transisi tidak ditemukan adanya masalah (tidak ditemukan cluster di satuan pendidikan/sekolah baru akibat PTM), maka satuan pendidikan/sekolah masuk dalam kebiasaan barun;
4. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombel/kelas, dijelaskan sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tingkat SD, SMP atau yang setara: 18 (delapan belas) peserta didik/siswa maksimal per rombel/kelas;
- b. Tingkat PAUD/TK atau yang setara: 5 (lima) peserta didik/siswa maksimal per rombel/kelas;
5. Jumlah dari jam pembelajaran tatap muka ditentukan oleh satuan pendidikan (kewenangan satuan pendidikan) dengan pembagian rombongan belajar (*shift*) dan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan;
6. Jika terdapat warga sekolah terpapar Covid-19 wajib dihentikan;
7. PTM untuk jenjang SD dan SMP sederajat akan dimulai tanggal 4 Januari 2021, sedangkan untuk jenjang PAUD (KB dan TK) akan dimulai setelah dilakukan evaluasi transisi (2 bulan setelah dimulai Pembelajaran Tatap Muka jenjang SD dan SMP sederajat);
8. Pelaksanaan PTM harus mendapatkan izin orang tua/ wali murid bermaterai 6000. Bagi orang tua/ wali murid peserta didik yang tidak memberikan izin kepada anaknya mengikuti PTM, sekolah tetap melakukan pelayanan pembelajaran peserta didik/siswa tersebut secara BDR/PJJ (daring ataupun luring);
9. Satuan Pendidikan harus membentuk satuan tugas penanganan Covid-19 dan melibatkan orang tua/wali murid dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut; Tim pembelajaran, psikososial dan tata ruang; Tim kesehatan, kebersihan dan keamanan dan Tim pelatihan dan humas;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Tupoksi Tim tersebut diatas dapat dipelajari dan dipahami Keputusan Bersama empat menteri)

10. Satuan Pendidikan/sekolah Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sara prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan yang bersumber dana BOS Regular Tahun Anggaran 2021;
11. Setiap satuan pendidikan/sekolah **Wajib** menginformasikan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif *Covid-19*;
12. Satuan pendidikan/sekolah harus membuat Baliho tentang upaya pencegahan/penanganan penularan dan dampak negatif/ bahaya yang ditimbulkan *Covid-19*;
13. Setiap satuan pendidikan/sekolah juga **Wajib** menyelesaikan penyusunan Kurikulum Sekolah pada kondisi khusus/ Darurat *Covid-19*;
14. Satuan pendidikan di **Wajibkan** memiliki/memegang dokumen (File dan Print Out) semua Peraturan ataupun Petunjuk Teknis pelaksanaan PTM mulai dari tingkat Pusat (Kementrian) sampai dengan tingkat Daerah (Izin Bupati atau SE dari Kepala Dinas).

Dari latar belakang masalah di atas yang ditemui di lapangan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DASAR MASA PANDEMI***



## **COVID-19 (STUDI KASUS DI SDN 008 RUMBIO KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR)**

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar terkait Pembelajaran Pendidikan Dasar masa pandemi Covid-19 di SDN 008 Rumbio?
2. Apa saja hambatan-hambatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar terkait Pembelajaran Pendidikan Dasar masa pandemi Covid-19 di SD 008 Rumbio?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kebijakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar terkait Pembelajaran Pendidikan Dasar masa pandemi Covid-19 di SDN 008 Rumbio.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar dalam proses pembelajaran masa pandemi Covid-19 di SDN 008 Rumbio.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Setelah nantinya penelitian ini berakhir diharapkan tentunya menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah yang dapat memberikan manfaat bagi berbagai





kalangan, adapun beberapa manfaat yang diharapkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penulis adalah merupakan kesempatan yang baik untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi S1 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.
2. Bagi dinas adalah Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi pemimpin untuk mengetahui kebijakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar terkait Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar masa pandemi Covid-19.
3. Bagi pembaca adalah sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan untuk penelitian selanjutnya.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tinjauan mengenai kebijakan pengelolaan, pendidikan dasar, pengelolaan pembelajaran daring, peraturan peraturan kebijakan daring, pandangan Islam terhadap Kebijakan Publik, penelitian terdahulu, hipotesis, konsep operasional.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, infroman penelitian, metode analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisikan sejarah singkat Kabupaten Kampar, visi misi, sejarah singkat, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan sub yang berisikan tentang hasil penelitian di lapangan yaitu mengenai Analisis Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di SDN 008 Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) mengetahui hambatan kebijakan pembelajaran pendidikan dasar masa pandemi Covid-19.

### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini menerangkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang terkait dengan masalah temuan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2008:7)

Kebijakan publik menurut (Sulaiman, 1988:5) adalah sebagai kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. Sedangkan menurut (Dunn, 2003:132) mengatakan kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2002:16). Selain itu dalam praktiknya kebijakan publik baiknya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Widodo, 2001:190) :

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu;
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan;
- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu);
- e. Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Kebijakan publik adalah kebijakan yang oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk kebijakan yang lain. Seperti kebijakan yang dikeluarkan pihak swasta dan lainnya (Winarno, 2007:19). Untuk memudahkan pemahaman kebijakan publik, dapat ditinjau dari 5 karakteristik kebijakan publik, yaitu:

- a. Memiliki tujuan yang disepakati untuk dicapai atau tujuan yang dipahami;
- b. Melibatkan keputusan beserta konsekuensinya;
- c. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu;
- d. Pada hakikatnya adalah politik;
- e. Bersifat dinamis.

Menurut (Nugroho, 2011:143), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Sementara menurut Young dan Quinn (dalam Suharno 2008:44)

membahas beberapa konsep kunci yang ada dalam kebijakan publik:

a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik atau tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya;

b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berusaha merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang dimasyarakat;

c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak;

d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan oleh perorangan/ kelompok

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat kolektif dan kompleks yang diajukan kepada pemerintah yang memiliki tujuan dan memiliki orientasi yang jelas.

### 2.1.1. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap Kebijakan Publik oleh (Winarno, 2007:32) adalah sebagai berikut:

#### a. Tahap penyusunan agenda

Pada tahap ini pejabat yang dipilih dan diangkat menetapkan atau mengumpulkan masalah-masalah publik pada agenda publik.

#### b. Tahap formulasi kebijakan

Pada tahap ini masalah yang telah dimasukkan keagenda kebijakan kemudia dibahas oleh para pembuat keputusan dan diberikan beberapa alternatif penyelesaian.

##### a) Tahap dopsi kebijakan

Pada tahap ini banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus, antara direktur lemabag atau keputusan pengadilan.

##### b) Tahap impementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh badan badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah.

- c) Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana mampu memecahkan masalah.

## 2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun, dalam praktik badan-badan pemerintahnya sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang untuk membuat diskresi, untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan, aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknis secara sinergitas yang digerakkan untuk berkerjasama guna merepakan kebijakan tertentu yang dikehendaki.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan nya. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program; atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Nugroho, 2006:494).

Van Meter dan Horn dalam (Agustino, 2014:139), menyatakan bahwa: implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Definisi lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam (Agustino 2012:8) mendefinisikan kebijakan sebagai: Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan pengadilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang bersifat dinamis, dimana peran penting dari seorang pemangku jabatan dalam melakukan tindakan secara cepat, tepat dan terukur serta mempunyai tujuan yang jelas terhadap arah kebijakan tersebut. kebijakan yang telah dibuat telah

## 2. Pendidikan Dasar

Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh pendidik terhadap anak didiknya dalam upaya meningkatkan kesadaran dan keilmuan, agar anak didiknya secara aktif dapat mengembangkan potensi dalam dirinya. Pada bidang pendidikan sains, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama untuk mengikuti pertumbuhan dan perkembangan di era modern ini.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut kamus besar bahasa indonesia pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara dan pembuatan mendidik. Menurut Iman Al-Ghazali, mendefinisikan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, dimana tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada allah swt sehingga menjadi manusia sempurna.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut **Notoadmodjo (2003:16)**, mendefinisikan bahwa Pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Dalam hal ini tak terkecuali pendidikan perguruan tinggi juga mendapat perhatian dan perlakuan sama dalam membantu meringankan beban pemerintah untuk mewujudkan pembangunan manusia yang lebih maju dalam hal pemikiran serta daya saing nya dengan masyarakat luar. Ini tertuang pada pasal 20 ayat (2) dinyatakan bahwa perguruan tinggi harus mampu memberdayakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat Melalui Tri Dharma Pendidikan Tinggi.

Menurut UUD 1945, Pendidikan Dasar merupakan suatu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti, dan santun serta menyelesaikan permasalahan dilingkungannya. Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan anak yang berusia 7 sampai 13 tahun sebagai pendidikan ditingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan sosial budaya.

### 2.3. Pengelolaan Pembelajaran Daring

Menurut **Hasibuan (2011:37)** konsep mengajar dalam proses perkembangannya masih dianggap sebagai suatu kegiatan penyampaian atau penyerahan pengetahuan. Pandangan semacam ini masih umum digunakan di kalangan pengajar. Mengajar menurut pengertian mutakhir merupakan suatu perbuatan yang kompleks. Perbuatan mengajar yang kompleks dapat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diherjemahkan sebagai penggunaan secara integrative sejumlah komponen yang terkandung dalam perbuatan mengajar itu untuk menyampaikan pesan pengajaran. Dalam proses belajar mengajar guru memiliki peran yaitu: (1) tahap sebelum pengajaran, (2) tahap pengajaran, dan (3) tahap setelah pengajaran.

Pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1) Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan awal untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Banyak pengertian yang diberikan para ahli pembelajaran tentang tujuan pembelajaran, yang satu sama lain memiliki kesamaan di samping ada perbedaan sesuai dengan sudut pandang garapannya. Menurut **Uno (2010:35)** memberikan pengertian "Tujuan pembelajaran sebagai perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu".

#### 2) Pelaksanaan Pembelajaran

Menurut **Makmun (2012:220)** menyatakan bahwa "Pendekatan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu garis besar dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan". Pendekatan adalah cara atau upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran tertentu. Pendekatan pembelajaran adalah tindakan guru melaksanakan rencana mengajar. Artinya, usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran (tujuan, bahan, metode dan alat, serta evaluasi) agar dapat memengaruhi siswa mencapai tujuan yang telah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan. Pendekatan adalah cara menyikapi sesuatu dan cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang menjadi landasan untuk tindak lanjutnya.

#### 3) Evaluasi Pembelajaran

Menurut **Hamalik (2010:145)** “Evaluasi pengajaran merupakan suatu komponen dalam sistem pengajaran, sedangkan sistem pengajaran itu sendiri merupakan implementasi kurikulum, sebagai upaya untuk menciptakan belajar di kelas”. Fungsi utama evaluasi dalam kelas adalah untuk menentukan hasil-hasil urutan pengajaran. Hasil-hasil dicapai langsung bertalian dengan penguasaan tujuan tujuan yang menjadi target. Selain itu, evaluasi juga berfungsi menilai unsur-unsur 13 yang relevan pada urutan perencanaan dan pelaksanaan pengajaran. Itu sebabnya, evaluasi menempati kedudukan penting dalam rancangan kurikulum dan rancangan pengajaran.

Pembelajaran daring atau *E-Learning* merupakan segala pemanfaatan atau penggunaan teknologi internet dan web untuk menciptakan pengalaman belajar. *E-Learning* dapat dipandang sebagai suatu pendekatan yang inovatif untuk dijadikan sebuah desain media penyampaian yang baik, terpusat pada pengguna, interaktif dan sebagai lingkungan belajar yang memiliki berbagai kemudahan-kemudahan bagi siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Dengan memanfaatkan berbagai atribut dan sumber teknologi digital dengan bentuk lain dari materi dan bahan pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan pada suatu lingkungan belajar yang terbuka, fleksibel, dan terdistribusi.

Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mentransformasikan proses pembelajaran

antara pendidik dan peserta didik. Tujuan utama penggunaan teknologi ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pembelajaran. Di samping itu, suatu pembelajaran daring juga mempunyai kemudahan bantuan profesional isi pelajaran secara online. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kenyamanan belajar dengan obyeknya adalah layanan pembelajaran yang lebih baik, menarik, interaktif dan atraktif. Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan prestasi dan kecakapan akademik peserta didik serta pengurangan biaya, waktu, dan tenaga untuk proses pembelajaran (Budi Murtiyasa, 2012:31).

#### 2.4. Peraturan Peraturan Kebijakan Daring

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi X DPR RI mengumumkan rencana penyusunan Keputusan Bersama Empat Kementerian tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Panduan yang disusun dari hasil kerjasama dan sinergi antar kementerian ini bertujuan mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani masa kebiasaan baru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini (PAUD) pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Namun demikian, untuk daerah yang berada di zona kuning, orange, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

#### 2.4.1. Panduan Pembelajaran Tatap Muka pada Zona Hijau

Di luar pelarangan yang berlaku di zona kuning, orange, dan merah, tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, urutan pertama yang diperbolehkan pembelajaran tatap muka adalah pendidikan tingkat atas dan sederajat, tahap kedua pendidikan tingkat menengah dan sederajat, lalu tahap ketiga tingkat dasar dan sederajat. Itupun harus dilakukan sesuai dengan tahapan waktu yang telah ditentukan.

Rincian tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau adalah:

- a) Tahap I: SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, Paket B.
- b) Tahap II dilaksanakan dua bulan setelah tahap I: SD, MI, Paket A dan SLB.
- c) Tahap III dilaksanakan dua bulan setelah tahap II: PAUD formal (TK, RA, dan TKLB) dan non formal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau harus melaksanakan Belajar dari Rumah serta dilarang membuka asrama dan pembelajaran tatap muka selama masa transisi (dua bulan pertama). Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan mengikuti ketentuan pengisian kapasitas asrama.

Selanjutnya untuk satuan pendidikan di zona hijau, kepala satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar pemeriksaan kesiapan sesuai protokol kesehatan Kementerian Kesehatan. Kemendikbud akan menerbitkan berbagai materi panduan seperti program khusus di TVRI, infografik, poster, buku saku, dan materi lain mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan pada fase pembelajaran tatap muka di zona hijau.

### 2.5. Pengelolaan Pembelajaran Tatap Muka Masa Pandemi Covid-19

Ada sejumlah protokol kesehatan yang wajib dipenuhi setiap satuan pendidikan sebelum dan setelah pembelajaran. Seluruh protokol wajib dipenuhi oleh setiap warga sekolah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5.1. Satuan Pendidikan

**Tabel 2.1**  
**Satuan Pendidikan**

Sebelum Pembelajaran (1)	Setelah Pembelajaran (2)
<p>c. Melakukan disinfeksi sarana prasana dan lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>d. Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);</p> <p>e. Memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;</p> <p>f. Memastikan thermogun (pengukur suhu tembus tembak) berfungsi dengan baik;</p> <p>g. Melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek sakit tenggorokab, dan/atau sesak nafas.</p>	<p>a. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;</p> <p>b. Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);</p> <p>c. Memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;</p> <p>d. Memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi engan baik; dan</p> <p>e. Melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada Dinas Pendidikan, kantor wiliyah, kementrian agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.</p>

Sumber : Surat Edaran (SE) Izin Melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).  
Nomor 421/Dikpora-Sekr/16751

## 2.5.2. Warga Satuan Pendidikan

**Tabel 2.2**  
**Warga Satuan Pendidikan**

No	Posisi	Aktivitas
(1)	(2)	(3)
1.	Sebelum berangkat	<p>a. Sarapan/konsumsi gizi seimbang;</p> <p>b. Memastikan diri dalam kondisi sehat dan</p>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Posisi	Aktivitas
(1)	(2)	(3)
		<p>tidak memiliki gejala: suhu <math>&gt;37,3^{\circ}\text{C}</math>, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas;</p> <p>c. Memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor;</p> <p>d. Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer);</p> <p>e. Membawa makanan beserta alat makan dan minum sesuai kebutuhan;</p> <p>f. Wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.</p>
2.	Selama pembelajaran	<p>a. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>b. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;</p> <p>c. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi public/antar-jemput.</p>
3.	Sebelum masuk gerbang	<p>a. Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;</p> <p>b. Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan/atau sesak nafas;</p> <p>c. Melakukab CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;</p> <p>d. Untuk tamu, mengikuti protocol kesehatan di satuan pendidikan.</p>
4.	Salaam kegiatan belajar	<p>a. Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minal 1.5 (satu koma lima) meter;</p> <p>b. Menggunakan alat belajar, alat music, dan alat makan minum pribadi;</p> <p>c. Dilarang pinajm meminjam peralatan;</p> <p>d. Memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CPTS, dan jaga jarak;</p> <p>e. Melakukan pengamatan visual kesehatan</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Posisi	Aktivitas
(1)	(2)	(3)
		warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protocol kesehatan satuan pendidikan.
5.	Selesai Kegiatan Belajar Mengajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruangan kelas;</li> <li>b. Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak;</li> <li>c. Penjemputan peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak abtri tang sudag ditandai.</li> </ol>
6.	Perjalanan pulang dari Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 2,5 (satu koma lima) meter;</li> <li>b. Hindatri menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata dan muut. Serta menerapkan etika batuk dan bersin;</li> <li>c. Membersihkan tabgan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi public/antar jemput.</li> </ol>
7.	Setelah Sampai di Rumah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melepaskan alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket dan alinnya;</li> <li>b. Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang kain dirumah;</li> <li>c. Tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin;</li> <li>d. Jika wagra satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh <math>37,3^{\circ}\text{C}</math>, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan diminta segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.</li> </ol>

**Sumber : Surat Edaran (SE) Izin Melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Nomor 421/Dikpora-Sekr/16751**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2.3. Selama Berada di Lingkungan Satuan Pendidikan**

**Tabel 2.3**  
**Selama Berada di Lingkungan Satuan Pendidikan**

No.	Posisi	Aktivias
(1)	(2)	(3)
1.	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	a. Melakukan CTPS sebelum masuk dan keluar ruangan; b. Meletakkan buku/alat pratikum pada tempat yang telah disediakan; c. Selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
2.	Kantin	a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah makan; b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. Masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; d. Memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; e. Memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik.
3.	Toilet	a. Melakukan CTPS setelah menggunakan kamar mandi dan toilet; b. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.
4.	Tempat Ibadah	a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah beribadah; b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; c. Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; d. Hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, kitab suci, dan lain-lain; e. Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
5.	Tangga dan Lorong	a. Berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; b. Dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
6.	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Posisi	Aktivias
(1)	(2)	(3)
		jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olahraga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
7.	Ruang Serba Guna dan Ruang Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga;</li> <li>b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</li> <li>c. Olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara;</li> <li>d. Gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain;</li> <li>e. Dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga.</li> </ol>
8.	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah memasuki asrama;</li> <li>b. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</li> <li>c. Membersihkan kamar dan lingkungannya;</li> <li>d. Melakukan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan;</li> <li>e. Membersihkan dengan disinfektan pada gagang pintu, yombo/saklar lampu dan permukaan benda yang sering disentuh</li> <li>f. Memastikan sirkulasi udara asrama baik;</li> <li>g. Membersihkan kamar mandi setiap hari;</li> <li>h. Dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.</li> </ol>

**Sumber : Surat Edaran (SE) Izin Melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Nomor 421/Dikpora-Sekr/16751**

## 6. Pandangan Islam Terhadap Kebijakan Publik

Islam adalah agama yang sangat sempurna ajarannya, tidak hanya membahas masalah aqidah saja namun lebih daripada itu yaitu tentang syariah yang didalamnya terdapat ajaran tentang ibadah dan muamalah serta akhlak. Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan kehidupan disegala aspek, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kelengkapan ajarannya telah mendorong manusia brgrak menuju pertumbuhan dan kebangunan Intelektual dan Kultural. Sumber ajarannya berasal dari Al-Qur'an dan Hadist.

Begitu juga dalam hal kebijakan pemerintah tidak akan pernah lepas dari ajaran Islam. Jauh sebelum Ilmuan barat mengutarakan teori-teori seputar kebijakn pemerintah ini. Al-Qur'an dan Hadist telah membicarakan itu semua telah tertuang didalamnya skarang hanya tinggal bagaimana kita mau atau tidak mengikutinya.

Kebijaksanaan itu merupakan pengambilan keputusan dan pengambilan kebijaksanaan, yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Berikut isi Al-Qur'an yang tertera dalam Surah An-Nisaa' Ayat 135 tentang Kebijaksanaan Pemerintah:

Telah Allah SWT Berfirman dalam QS An-Nisaa' (4) Ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أُولَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ  
تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui Segala apa yang kamu kerjakan”.

Dalam pemikiran Al-Qur'an pemerintah dengan sendirinya tidak memiliki nilai intrinsic, tapi kekuasaan harus ditujukan untuk mengetahui dan menyelesaikan perselisihan dan mengatur masyarakat, meimplementasikan dengan mantap keputusan, program dan kebijakan serta tidak menunda atau lemah dalam melaksanakan Undang-Undang.

Allah SWT Berfirman dalam QS. Ali Imran: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ  
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي  
الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkan lah mereka,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Menyukai Orang-orang yang bertawakal Kepada-Nya". (QS. Ali Imran: 159)*

Dari penjelasan apabila mempunyai suatu keinginan atau membulatkan tekad, maka bertawakallah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Ketakwaan dalam segala bidang juga punya kemampuan ilmiah dan ketahanan fisik untuk melakukan pekerjaan yang diterima oleh logika dan gama. Berarti pemerintah mempunyai suatu tekad dalam bidang kebijakan ketertiban sosial. Sifat-sifat ini tentu saja memperkuat kebijakan pemerintah dan tidak ada yang diperoleh oleh rakyatnya kecuali kemaslahatan, kebaikan dan jauh dari kenyamanan masyarakat.

### 2.7. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Penulis/ Tahun	Hasil
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Pengelolaan Pembelajaran Jarak Jauh Yang Memandirikan Siswa dan Implikasinya pada Pelayanan Pendidikan	Dina Sri Nindiati (2020:14)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh harus ddikelola dengan sistematis dimulai ddari penyusunan silabuss materi, pemilihan aktivitas belajar, dan strategi pembelajarannya. Merumuskan struktur materi dan memilih aktivitas yang relevan, adapun tugas yang ddiberikan harus mempertimbangkan beban, waktu, dan kemampuan siswa.
2	Straegi Kepala TK dalam	Cucu Jajat Sudrajat, Mubiar Agustin,	Hasil penelitian menunjukkan, mutu penidikan TK pada masa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Judul	Penulis/ Tahun	Hasil
(1)	(2)	(3)	(5)
2	meningkatkan Mutu Pendidikan TK pada masa pandemi Covid-19	Leli Kurniati, Dede Karsa (2020:508)	pandemi Covid 19 sangat baik (85,90%). <i>Proses Approach</i> (88,24%) merupakan skor tertinggi, menunjukkan pendekatan proses menjadi prioritas utama dilakukan. Sedangkan tanggungjawab (81,21%) merupakan skor terendah, menunjukkn belum
3	Implementasi Physical Distancing Pengelolaan	Faizin dan Shafiah (2020:135)	optimalnya pelaksanaan kepemimpinan kepada sekolah masa pandei Covid 19 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengelolaan pembelajaran pada anak usia dini melalui pemanfaatan perangkat media sosial di Raudatul Athfal (RA) Tania, Paiton, Probalingo, Jawa Timur sebagai berikut: Pembuatan desai perencanaan pembelajaran selama masa pandemi Covid 19, mengimplementasikan perencanaan tersebut dalam pembelajaran daring, memonitoring pelaksanaan pembelajaran, pemberian reward and punishment dan melakukan evaluasi secara berkala

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak pada jumlah populasi dan sampel penelitian, teori yang dipakai penulis, terdapat perbedaan pada indikator, dan juga hasil dari penelitian.

## 2.8. Konsep Operasional

Berdasarkan teori George Edward III tentang Faktor-Faktor keberhasilan implementasi kebijakan ada 4 (empat) yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.5**  
**Indikator Penelitian**

Referensi	Indikator	Sub Indikator
(1)	(2)	(3)
Teori Edward (dalam Widodo, 2010:97)	Komunikasi	a. Transmisi, kebijakan dilakukan melalui sosialisasi kepada seluruh badan-badan dinas selingkungan Kabupatenkamar dan disebarkan juga menggunakan media massa elektronik; b. Koordinasi dalam pemberian informasi berjalan baik dan harus mengandung <b>kejelasan</b> agar maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut dapat dipahami dan direalisasikan dengan baik; c. Teknik pengsosialisasian yang telah tersampaikan kepada <i>implemntor</i> akan menghasilkan <b>konsistensi</b> menyukkseskan kebijakan ini.
	Sumber Daya	a. <b>Sumberdaya manusia</b> merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan; b. Terbatasnya <b>sumberdaya anggaran</b> yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas; c. <b>Sumberdaya peralatan</b> merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan; d. Pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi <b>sumberdaya kewenangan</b> .



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Disposisi	a. Informasi atau pernah terlibat langsung kebijakan; b. Memiliki respon positif /baik terhadap kebijakan pemerintah.
	Struktur Birokrasi	a. Adanya profesionalisme dalam bekerja serta pemahaman yang memadai dalam bekerja, artinya secara formalitas memiliki <b>SOP</b> ; b. <b>Fragmentasi atau tanggung jawab</b> struktur yang tertinggi adalah kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar yang harus berani mengambil kebijakan. Pejabat yang berkepentingan terhadap aturan tersebut memberikan perannya dengan rasa <b>tanggungjawab</b> demi tercapainya tujuan kebijakan.

Sumber : Widodo, 2010:97



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar dimulai pada bulan Januari s/d Juni tahun 2021 hingga selesai. Dipilihnya lokasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, karena di Dinas tersebut banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### 3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengertian kualitatif menurut **Sugiyono (2005:1)** adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari genarilisasi.

Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa bagaimana kebijakan pengelolaan pendidikan dasar masa pandemi Covid-19 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

#### 3.3. Sumber Data

Secara keseluruhan, yang dipandang sebagai sumber data penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1 Data Primer

Data primer merupakan salah satu sumber data yang bersifat pokok dan didapat secara langsung saat pengumpulan data. Jadi data yang dimaksud sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber dan data pokok dalam sebuah penelitian ini adalah kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD dan SMP dan Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD dan SMP.

#### 2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari teori, laporan-laporan, buku-buku, dan pendapat para ahli tentang kebijakan pengelolaan pembelajaran masa pandemi Covid-19.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:

#### 1 Observasi

**Sutrisno Hadi (1986)** dalam buku Sugiono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses pengamatan dan ingatan. Penulis melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mengetahui kebijakan pengelolaan pembelajaran pendidikan dasar masa pandemi Covid-19 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2 Wawancara

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. **Sutrisno Hadi (1986)** dalam buku Sugiono mengemukakan bahwa, anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview adalah bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka langsung dengan responden maupun dengan menggunakan media telepon. Penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada kepala kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD dan SMP, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD dan SMP, dan kepala sekolah yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti demi kesempurnaan data yang akan diperoleh.

## 3 Dokementasi

Dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan cara meminta dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pembelajaran pendidikan dasar masa penemi Covid-19. Dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan cara meminta dokumen yang berisi data-data yang penulis butuhkan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

### 3.5. Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Subjek penelitian atau informan adalah orang yang diminta untuk

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan keterangan tentang suatu fakta lapangan atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2004:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti memilih key informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian.

**Tabel. 3.1**  
**Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD dan SMP	1
2	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD dan SMP	1
3	Pegawai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar	1
4	Kepala Sekolah SD Negeri 008 Rumbio	1
5	Komite Sekolah SD Negeri 008 Rumbio	1
6	Orangtua Wali Murid	2
7	Siswa SD Negeri 008 Rumbio	1

**Sumber : Olahan Penulis, 2021**

### 3.6. Metode Analisa Data

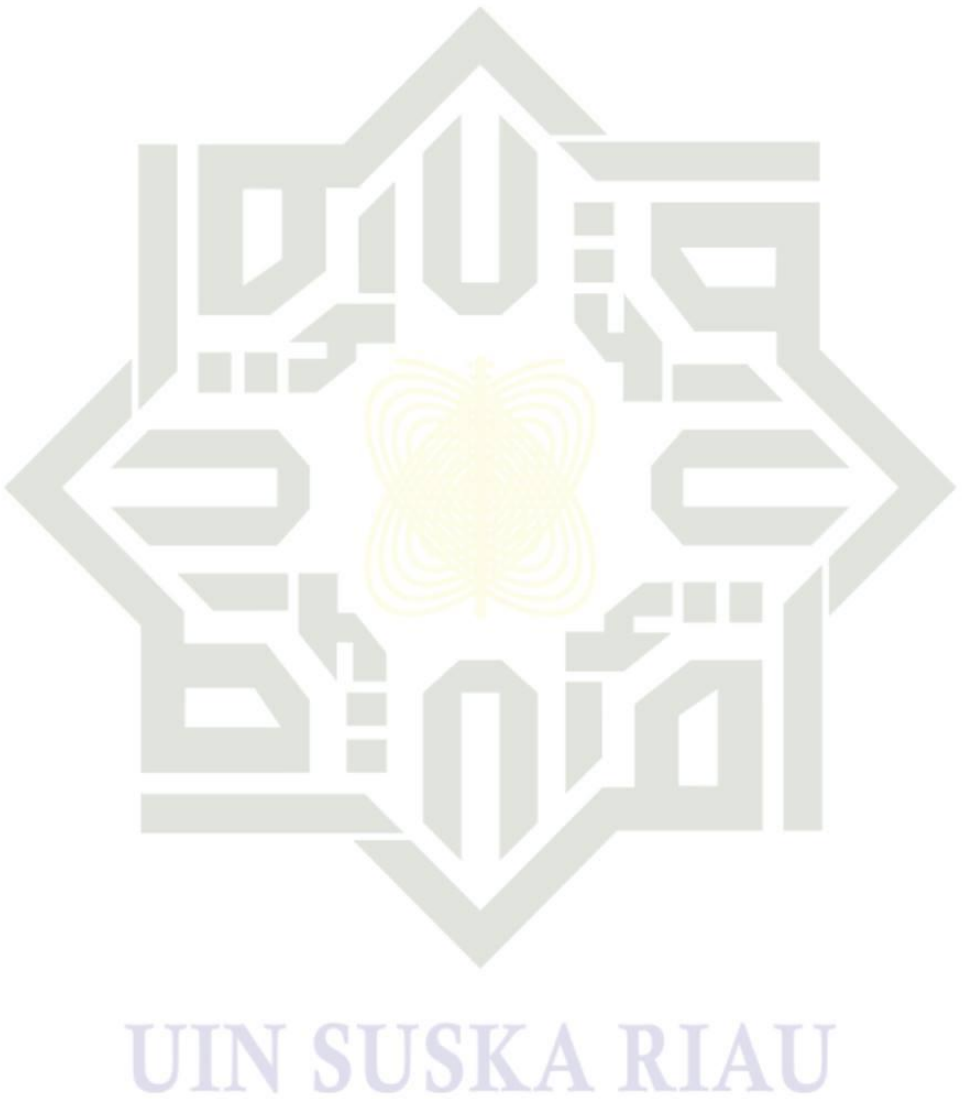
Metode analisa data adalah proses mencari menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. (Bodgan dalam Sugiyono 2013:224).

Dalam penulisan proposal ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta yang ada. Metode kualitatif ini dimaksud agar memperoleh gambaran keadaan dan data secara sistematis tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### Gambaran singkat Kabupaten Kampar

##### 4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui proses yang cukup panjang. Diawali dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November 1949. Dimana Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibukota Pekanbaru.

Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar.

Kemudian tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No. : 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan otonomi daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Selanjutnya, tanggal 6 Februari 1950, ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kampar yang setiap tahun diperingati. Penetapan hari jadi ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar No: 02 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: kpts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor: 01 Tanggal 5 Februari 1999. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan dari Pekanbaru ke Bangkinang.

#### 4.1.2. Letak Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang 1.128.928 Ha, yang terletak antara 01°00'40" lintang utara sampai 00°27'00" lintang selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" bujur timur. Adapun batas- batas wilayah Kabupaten Kampar sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Kekayaan kultur di Kabupaten Kampar tidak lepas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pengaruh kebudayaan daerah tetangga yang terletak di sekitarnya. Pengaruh budaya ini lambat laun memasuki proses asimilasi dan sebagai hasilnya Kampar juga kaya akan budaya yang beragam dan khas. Wilayah Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, danau dan rawa-rawa. Sungai besar diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya  $\pm 413,5$  km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Sungai Kampar mengalir dari hulu di punggung Bukit Barisan kearah Timur membelah wilayah Kabupaten Kampar. Sungai Kampar Kanan melalui beberapa kecamatan diantaranya kecamatan Koto Kampar Hulu, XIII Koto Kampar, Kuok, Salo, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Tambang, Siak Hulu.

#### 4.2 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar

Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar sebelum otonomi daerah terbagi dua yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas PK dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DEPDIBUD. Yang mana pada waktu itu Dinas PK bertugas membantu pemerintah daerah dalam bentuk sekolah negeri dan swasta serta Departemen PK membantu pemerintah pusat dan daerah provinsi dan Kabupaten sendiri dalam mengelola bidang pendidikan tingkat TK, SMP, SMA dan SMK. Setelah otonomi daerah lahir maka bergabunglah menjadi satu yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1999 dan sudah direvisi menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Maka seluruh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai departemen pendidikan dan kebudayaan menjadi pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan statusnya dari pegawai pusat menjadi pegawai daerah.

Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar pernah dipimpin oleh Astaman (1970-1974), Marzai (1974-1982), T. Abdul Jabar (1982-1984), Drs. Anis Daulay (1984-1985), Jamilus Atin (1986-1987), Adnan DS (1987-1992), Ridwan Kadir, SH (1992-1996) dan dengan ditunjuknya Kabupaten Kampar sebagai daerah Otonomi percontohan pada tahun 1996 dimana adanya sebagian urusan dipindahkan menjadi urusan daerah, maka berubah dinas nama dinas pendidikan dan kebudayaan menjadi dinas pendidikan pemuda dan olahraga dan sebagai kepala dinas menjadi pejabat Eselon II.b yang dijabat oleh Ridwan Kadir, SH (1996-1998), Drs. Yuzamri Yakub, M.Pd {1998-2000), Drs. Masri Ma'ahu (2000-2002), Drs. Basrun, S.Pd (2000-2004), Dr. Bustari Hasan (2004-2006), Drs. Basrun, M.Pd (2007), Alfi Syahri, SH (2007-2010), Amri Salam, M.Pd (2010-2012), Sedangkan mulai tahun 2012 berubah nama menjadi dinas pendidikan dan kebudayaan, sebagai kepala dinas Drs. Jawahir, M.Pd (2012-2014), Dr.H. Nasrul, M.Pd (2014-2017), pada tahun 2017 dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terbentuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Baru dengan nama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, sebagai Kepala Dinas Drs. M. Yasir, MM (2017 s/d Sekarang).

#### a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang Universitas Sumatera Utara tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar, maka visi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar yang ditetapkan sebagai arah dalam pengelolaan pendidikan kedepan untuk jangka waktu 5 tahun adalah: **“Terwujudnya Pendidikan yang Aspiratif, Berkualitas dan Mandiri Tahun 2025.”** Judul visi diatas perlu diberi penjelasan agar tidak menimbulkan persepsi dan pengertian yang berbeda tentang hakikat yang terkandung dalam visi tersebut:

1. Aspiratif artinya bahwa pendidikan yang dikembangkan harus berkeadilan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan swasta terhadap pendidikan.
2. Berkualitas artinya bahwa pendidikan yang dikembangkan mampu melahirkan generasi yang menguasai ilmu dan teknologi, agamis, berakhlak mulia, berbudaya, kreatif, dinamis dan mampu bersaing.
3. Mandiri artinya bahwa penyelenggaraan pendidikan semakin mandiri dan berkesinambungan berlandaskan Manajemen Berbasis Sekolah. Peran ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara komprehensif sehingga dapat memotivasi seluruh unsur masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dibidang pendidikan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Guna mewujudkan dan merealisasikan visi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, maka ditetapkan misinya sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima, baik untuk internal organisasi maupun pelayanan kepada publik.
2. Mewujudkan akses pendidikan yang merata dan bermutu disemua jenjang dan jenis pendidikan.
3. Mewujudkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan.
4. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga.
5. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian wewenang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah dalam Bidang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan Pelayanan Teknis, administratif, Koordinasi pelaksanaan tugas setiap Bidang, kegiatan Umum, Kepegawaian, Tugas Pembantuan, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta kegiatan bagian Keuangan dan Aset di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar. Sekretariat memiliki subbagian yaitu:

- a. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian keuangan dan aset di pimpin oleh Kepala Subbagian dan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi fisik dan keuangan serta Aset di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar

- b. Subagian Umum, Kepegawaian dan Tugas Pembantuan

Subbagian umum, kepegawaian dan tugas pembantuan di pimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan pekerjaan dan kegiatan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan penyelenggaraan tugas pembantuan.

- c. Subbagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subbagian perencanaan, monitoring dan evaluasi di pimpin oleh kepala Subbagian dan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

### 3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kurikulum dan penilaian, pembinaan peserta didik dan pembangunan parakter, kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar. Bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai seksi-seksi yaitu:

#### a. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Nonformal

Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Nonformal di pimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

#### b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Nonformal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Nonformal di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

- c. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal

Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

#### 4 Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan Kurikulum dan Penilaian SD dan SMP, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD dan SMP, Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar memiliki seksi-seksi yaitu:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD dan SMP

Seksi kurikulum dan Penilaian SD dan SMP dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kurikulum dan penilaian SD dan SMP.

b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD dan SMP

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD dan SMP dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.

c. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana SD dan SMP

Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SD dan SMP dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menatakelola Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Kabupaten dan Kampar.

5 Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam kegiatan Pemuda dan Olahraga di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar. Bidang Pemuda dan Olahraga memiliki seksi-seksi yaitu:

a. Seksi Pemuda

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam kegiatan Pemuda di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

b. Seksi Olahraga

Seksi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam kegiatan Olahraga di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

c. Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam Dinas Pendidikan, pengelolaan sarana prasarana bidang Pemuda dan Olahraga di lingkungan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

6 Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam kegiatan Pembinaan Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, SD, SMP di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar. Bidang Pembinaan Ketenagaan memiliki seksi-seksi yaitu:

a. Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Nonformal

Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan Pembinaan Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Pendidikan Nonformal di lingkungan Dinas, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

b. Seksi Ketenagaan SD

Seksi Ketenagaan SD dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan Pembinaan Ketenagaan SD di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

c. Seksi Ketenagaan SMP

Seksi Pembinaan Ketenagaan SMP dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan Pembinaan Ketenagaan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

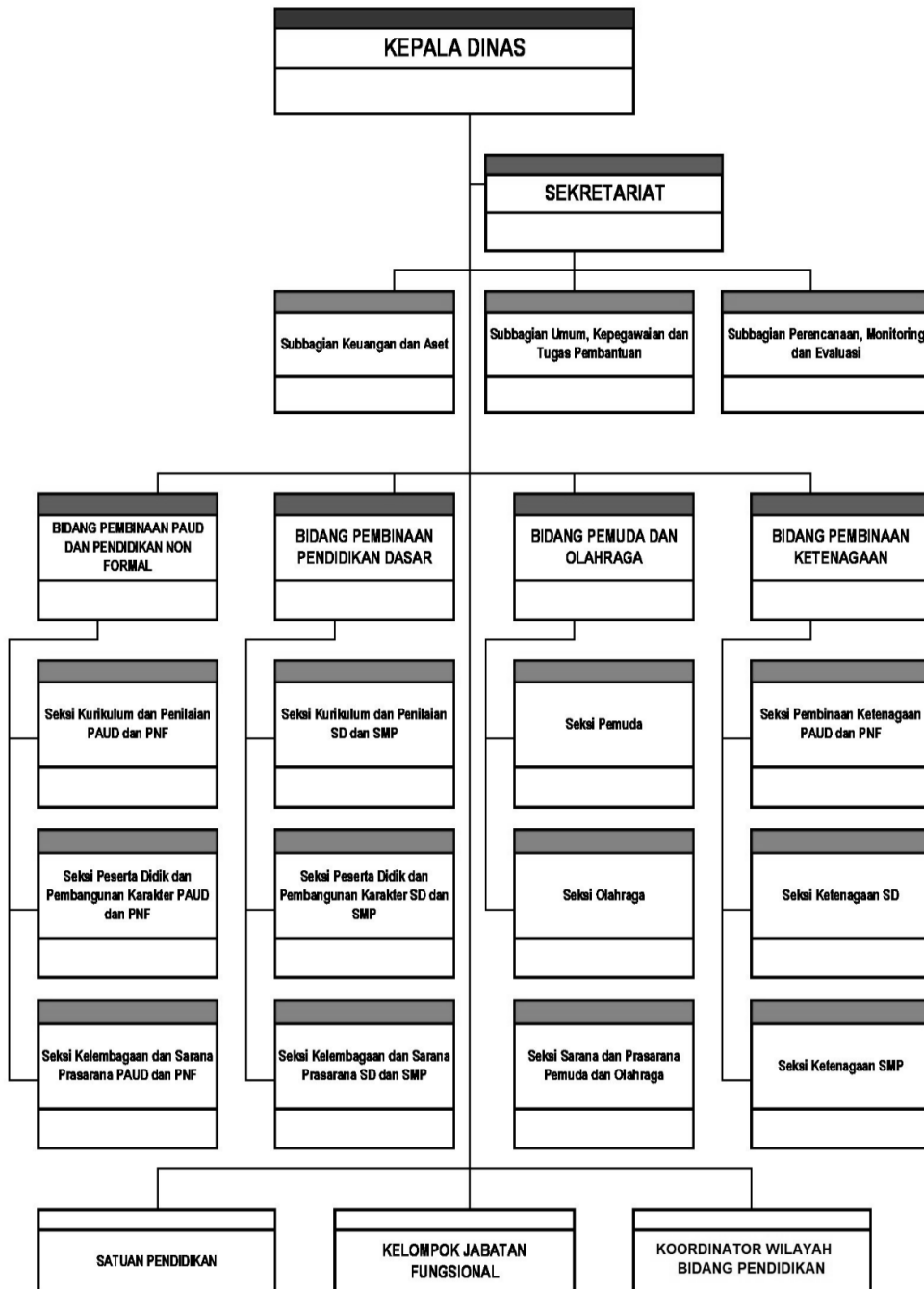
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar



Gambar 4.1

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk melihat bagaimana kebijakan pengelolaan pembelajaran pendidikan dasar masa pandemi covid-19 (Studi Kasus di SDN 008 Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kebijakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar terkait Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Kampar adalah dengan melakukan sosialisasi dan monitoring kepada sekolah dasar di kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Kampar dan sosialisasi diteruskan oleh Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kampar, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar telah melakukan monitoring untuk melihat bagaimana kesiapan-kesiapan sekolah melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan selama masa Pandemic Covid-19 pelaksanaan pembelajaran di SDN 008 Rumbio menggunakan semi-daring dan Pertemuan Tatap Muka (PTM)
2. Hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar dalam proses pembelajaran masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Kampar adalah Guru mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi karena keterbatasan interaksi langsung dengan siswa serta kekurangan waktu dalam menjelaskan materi yang cenderung dituntut untuk penuntasa kurikulum, kurangnya pengetahuan orang tua dan peserta

didik dalam penggunaan gadget atau smartphone sebagai media pembelajaran jarak jauh serta jaringan internet yang terkendala, pembelajaran tatap muka terbatas oleh waktu pembelajaran yang singkat.

## 2.2. Saran

Adapun saran-saran yang penulis dapat sampaikan dari hasil penelitian ini hasil penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan dasar masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SDN 008 Rambli Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) maka dapat penulis sampaikan bahwa:

1. Bagi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar diharapkan lebih memperhatikan bagaimana kondisi dan situasi saat ini dalam perumusan kebijakan di masa pandemi Covid-19. Dengan begitu pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Kampar dapat berjalan dengan lancar dan hendaknya lebih gencar lagi memberikan dukungan terhadap peserta didik dan guru dalam melaksanakan pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19.
2. Bagi Sekolah atau Satuan Pendidikan hendaknya lebih memfasilitasi guru dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran terutama pada pelaksanaan pembelajaran daring seperti sekarang ini.
3. Bagi guru dapat lebih mengembangkan pembelajaran yang dapat membuat kondisi belajar tetap efektif walaupun dilakukan dalam jaringan, lebih sering berkomunikasi dengan peserta didik. Guru hendaknya lebih meningkatkan kreativitasnya sebagai pendidik untuk menjadi guru yang lebih profesional.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

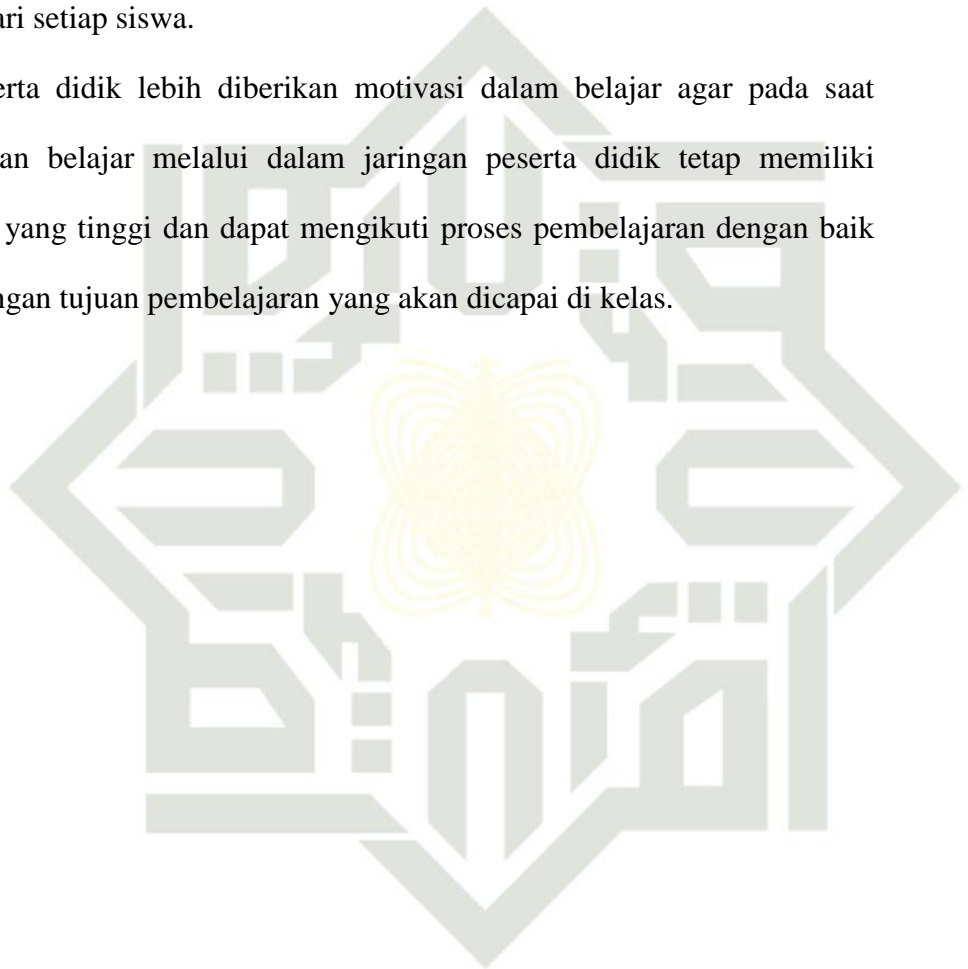
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagi guru dapat menambah pengetahuan dan pengalamannya dalam melaksanakan pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 di sekolah dasar dan guru diharapkan untuk lebih memperhatikan kebijakan dari pemerintah dalam merancang model pembelajaran. Serta melihat situasi dan kondisi dari setiap siswa.

5. Bagi peserta didik lebih diberikan motivasi dalam belajar agar pada saat pelaksanaan belajar melalui dalam jaringan peserta didik tetap memiliki semangat yang tinggi dan dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai di kelas.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, (2015). *Kebijakan Publik*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Ani, Nur, (2016). Pengembangan Dosen Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena Kabupaten Jayawijaya. Vol. 3 No. 2.
- Asriyanti, Siti. (2020). Pengelolaan Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid 19 di SDLB Muhammadiyah Surya Gemilang Banyubiru. *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK). Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Awaluddin dan Hendra. (2018). Fungsi Manajemen Dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Tadulako Indonesia. Vol. 2 No. 1.
- Faizin dan Shafiah. (2020). Implementasi Physical Distancing Pengelolaan. *Jurnal of Childhood Education*. Vol. 4 No. 2.
- Isna, Fitria dan Ricka O, (2016). Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan *MIX USE* Di Kecamatan Jabon. *Jurnal JKMP*. Vol. 4 No. 2.
- Hadi, Sutrisno. (1986). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamalik, Oemar. (2010). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Public (Proses, Analisis dan Partisipasi)*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Awildayanto, dkk. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif dan Aplikatif*. Bandung: CV Cendekia Pres.
- Makmum dan Abin Syamsudin. (2012). *Psikologi Kependidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murtiyasa, Budi. (2016). Isu-isu Kunci dan Tren Penelitian Pendidikan Matematik. *Makalah Utama*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. ISSN: 2502-6526.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nindiati, Dina S. (2020). Pengelolaan Pembelajaran Jarak Jauh Yang Memandirikan Siswa dan Implikasinya pada Pelayanan Pendidikan. *Journal of Education and Instruction*. Vol. 3 No. 1.

Notoatmodjo, Soekidjo. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Gustina, Reza. (2016). Implementasi Perda Kabupaten Inhil Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Studi Kasus Di Kecamatan Keritang. *Skripsi*. Program Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru.

Rohman, Arif. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

Sudrajat, dkk. (2020). Strategi Kepala TK dalam meningkatkan Mutu Pendidikan TK pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Vol. 5 No. 1.

Sugiyono, (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

\_\_\_\_\_, (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Al Fabet.

Sutapa, Mada. (2005). Perspektif Desentralisasi Pendidikan Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. UNY.

Terry, George R. (2010). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. (2014). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yulmida, Tengku. (2019). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa Di Chiba University). *Skripsi*. Program Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Surat :**

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perda (No. 6 Tahun 2008) Peraturan Daerah Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

Surat Edaran Bupati Kampar, Nomor : 360/Covid-19-Set/VI, tanggal 02 Juni 2020.

Surat Izin Bupati Kampar, Nomor: 005/SATGAS-SET/XII/074, tanggal : 30 Desember 2020, tentang: Izin Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap Tahun Pembelajaran 2020/2021.

### Undang-Undang :

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, Tujuan Pendidikan Nasional.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 1

### DAFTAR WAWACARA

Dalam penelitian ini, penulis melakukan beberapa wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan informan penelitian pada penelitian ini, yaitu dengan beberapa orang yang bersangkutan dengan kebijakan pembelajaran.

Adapun pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar sebelum kebijakan pengelolaan pembelajaran pendidikan dasar ini dilaksanakan?
2. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pembelajaran pendidikan dasar ini?
3. Berapa jumlah SDM/Guru di SDN 008 Rumbio terkait kebijakan pembelajaran pendidikan dasar?
4. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Kampar dalam proses pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 ini?
5. Dalam proses pembelajaran daring, fasilitas apa saja yang diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa?
6. Dari mana sumber dana untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan pembelajaran pendidikan dasar ini? Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran?
7. Apakah ada tindakan partisipatis oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar dalam mengelola pembelajaran daring?
8. Apakah kebijakan pengelolaan pembelajaran yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kampar memenuhi kepentingan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar terkait proses pembelajaran pendidikan dasar masa pandemi Covid-19?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bagaimana mekanisme prosedur (*Standard Opetation Procedure*) pelaksanaan dalam kebijakan pembelajaran pendidikan dasar yang meliputi pembelajaran dari rumah/daring?
10. Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan pembelajaran pendidikan dasar masa pandemi Covid-19 bagi sekolah bapak/ibu?
11. Bagaimana hasil pembelajaran siswa selama pandemic Covid-19 pada SDN 008 Rumbio?
12. Apakah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar telah memberikan informasi sebelumnya mengenai ketentuan pembelajaran tatap muka?



## Lampiran 2

### DOKUMENTASI



**Gambar 1**

**Foto bersama Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD dan SMP Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar bapak Darwin S.PD, M.Si**



**Gambar 2**

**Foto bersma Kepala Sekolah SDN 008 Rumbio bapak Zukfikri**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 3**

**Foto bersama Orangtua/Wali Murid SDN 008 Rumbio**



**Gambar 4**

**Foto bersama Siswa/Murid SDN 008 Rumbio**





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37842  
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/70/2021 Tanggal 7 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>GILANG RYAN PRATAMA</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | <b>11770513343</b>   |
| 3. Program Studi     | : | <b>ILMU ADMINISTRASI NEGARA</b>  |
| 4. Jenjang           | : | <b>S1</b>  |
| 5. Alamat            | : | <b>RUMBIO</b>  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DASAR MASA PANDEMI COVID-19 PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <b>DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR</b>   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 20 Januari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JL. MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. 20872  
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

## REKOMENDASI

Nomor : 070 / Dikpora - Sekr / 1610

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar, berdasarkan Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/KKBP/2021/43 tanggal 25 Januari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : GILANG RYAN PRATAMA  
NIM : 11770513343  
Universitas : UIN Suska Riau  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa Pandemi Covid-19 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar  
Tujuan : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini;
2. Kepada yang melakukan penelitian agar dapat menjaga kerahasiaan Data yang diberikan;
3. Pelaksanaan kegiatan/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan tersebut dan terima kasih.

Bangkinang, 9 Februari 2021

a.n Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan  
dan Olahraga Kabupaten Kampar  
Sekretaris



H. ADIL, SH, M.Si  
Pembina Tk.I

NIP. 19711015 199108 1 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/70/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Pra Riset**

Pekanbaru, 7 Januari 2021 M  
23 Jumadil Awwal 1442 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Gilang Ryan Pratama  
NIM. : 11770513343  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Analisis Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa  
Pandemi Covid-19 Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga  
Kabupaten Kampar"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan  
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/233/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 19 Januari 2021 M  
5 Jumadil Akhir 1442 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Gilang Ryan Pratama  
NIM. : 11770513343  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"**Analisis Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa  
Pandemi Covid-19 Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga  
Kabupaten Kampar**". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan  
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG KOTA**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2021/62

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38157 tanggal 28 Januari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama             | : | <b>GILANG RYAN PRATAMA</b>   |
| 2. NIM              | : | 11770513343  |
| 3. Universitas      | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU  |
| 4. Program Studi    | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA   |
| 5. Jenjang          | : | S1   |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU  |
| 7. Judul Penelitian | : | <b>ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN<br/>PENDIDIKAN DASAR MASA PANDEMI COVID-19 PADA<br/>DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA<br/>KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS DI KECAMATAN<br/>KAMPAR)</b> |
| 8. Lokasi           | : | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 29 Januari 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa,

  
**ONNITA, SE**  
Penata Tk. I  
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar di Bangkinang.
2. Kepala SD N 008 Rumbio di Kampar.
3. Kepala SD N 018 Penyasawan di Kampar.
4. Kepala SD N 004 Padang Mutung di Kampar.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
6. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Mayjen D.I. Panjaitan No. 16 Telp(0762) 20872

BANGKINANG KOTA

KODE POS : 28412

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Darwin S.Pd, M.Si  
NIP : 19671006 198908 1 001  
Pangkat Golongan : Pembina/IV.A  
Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD dan SMP  
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan surat Kantor Kesbangpol Kabupaten Kampar Nomor 070/BKBP/2021/62 Tanggal 29 Januari 2021 perihal Rekomendasi Riset, Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau an. **GILANG RYAN PRATAMA**, NIM 11770513343, benar telah melakukan penelitian tentang **ANALISIS KEBIJAKAN PEGELOLAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DASAR MASA PANDEMI COVID-19 PADA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS DI KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN KAMPAR)** bertempat di Dinas Pedidikan Kemuudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Jl, Mayjen D.I. Panjaitan No. 16, Kabupaten Kampar.

Demikin surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Bangkinang Kota, 14 Juni 2021

Yang menyatakan,

  
**DARWIN S.Pd, M.Si**  
NIP. 19671006 198908 1 001





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**GILANG RYAN PRATAMA**, lahir di Penyasawan pada tanggal 15 Juni 1999. Anak pertama dari pasangan ayahanda Ridarwin (Almarhum) dan Ibunda Rosneli. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 008 Rumbio, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kampar, setelah menyelesaikan pendidikan SMP Negeri 1 Kampar pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Negeri dengan mengambil Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar (Studi Kasus Di Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kampar)”**. Penulis dapat menyelesaikan studi selama 3 tahun 11 bulan. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah pada 6 Juli 2021 M dengan IPK terakhir 3.56 dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S. Sos.).

UIN SUSKA RIAU